

BAB V

KESIMPULAN

Serangan teroris yang telah meluluh-lantakkan gedung kembar World Trade Center (WTC) di Manhattan, New York dan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon pada 11 September 2001 lalu, telah memunculkan beragam spekulasi dan analisis, tidak saja yang berkaitan dengan pelaku aksi, yang agaknya telah mengarah pada Osama bin Laden, tetapi juga mengenai dampak kejadian tersebut, antara lain terhadap Islam. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan eksistensi sebuah "*International Islam*" tragedi 11 September 2001 itu sangat merusak citra umat Islam.

Citra Islam semakin buruk dan terpojok, penilaian masyarakat internasional tentang Islam bahwa Islam itu penyebar terorisme, radikal, ekstrim, Islam kelompok garis tengah, Islam fundamentalis, dan sebagainya. Bisa dipastikan negara-negara Islam di Timur Tengah dan beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Indonesia, akan mengalami polarisasi dalam menyikapi aksi tersebut.

Amerika Serikat kemudian memanfaatkan momentum serangan 11 September 2001, untuk menerapkan semacam kebijakan, yang entah disadari atau tidak oleh pemerintahan George W Bush jelas-jelas telah memojokkan posisi umat Islam. Pasca tragedi tersebut Amerika Serikat menerapkan kebijakan administratif terhadap 15 negara yang mayoritas berpenduduk muslim untuk di berlakukan secara khusus masuk ke Amerika Serikat, tak pelakya dengan

Indonesia. Bagi Amerika Serikat, Indonesia adalah negeri yang amat penting, terutama penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Di mata Amerika Serikat, faktor Islam inilah yang jadi perhatian utama, karena agama ini sudah menjadi stigma di mayoritas penduduk Amerika Serikat sebagai agama yang menyebarkan terorisme.

Pasca tragedi 11 September 2001, hubungan Amerika Serikat-Indonesia mengalami masa-masa sulit, bahkan semakin sulit ketika terjadi Bom Bali, 12 Oktober 2002 yang menewaskan ratusan jiwa. Sejak itu kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia semakin menekan. Tuduhan Amerika Serikat akan keterlibatan tokoh-tokoh Al-Qaeda dan jaringannya di Indonesia seperti Jamaah Islamiyah, membuat pemerintah Megawati menjadi dilematis. Disatu sisi harus memberantas teroris atas desakan Amerika Serikat, namun disisi lain teroris yang dituduhkan tersebut bagian dari umat Islam yang notabene-nya umat mayoritas di Indonesia. Apalagi saat itu Megawati masih mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2004.

Pasca tragedi WTC 11 September 2001, Amerika Serikat berusaha menata ulang kembali keamanan dalam negerinya guna mencegah terulangnya kembali tragedi yang menewaskan banyak warga Amerika Serikat tersebut, salah satunya yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan yang bersifat administratif terhadap barang atau orang yang akan masuk maupun keluar Amerika Serikat. Beberapa departemen atau dinas pemerintah di Amerika Serikat, khususnya yang berhubungan dengan luar negeri, seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Dinas Militer, telah menerapkan kebijakan tersebut.

Dengan alasan menjaga keamanan negara dari serangan terorisme, Amerika Serikatpun menerapkan kebijakan administratif tersebut terhadap orang atau barang dari Indonesia yang akan masuk dan keluar Amerika Serikat. Pasca tragedi WTC 11 September 2001, Amerika Serikat sangat hati-hati dan selektif terhadap orang atau barang dari negara-negara Islam. Indonesia yang notabene mayoritas berpenduduk muslim juga mendapatkan perlakuan yang khusus dari pemerintah Amerika Serikat.

Entah disadari atau tidak oleh pemerintah Amerika Serikat, penerapan kebijakan yang sifatnya administratif tersebut telah menimbulkan sikap yang diskriminatif. Warga negara Indonesia maupun produk-produk dari Indonesia yang akan masuk dan keluar Amerika Serikat, banyak mendapati perlakuan yang tidak menyenangkan, salah satunya seperti pengurusan izin dipersulit dianggap tidak memenuhi ketentuan, atau dianggap membahayakan keamanan dan keselamatan warga Amerika Serikat. Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga melakukan pemeriksaan (pengeledahan) dan pengawasan warga Indonesia yang berada di Amerika.

Dengan adanya kebijakan administratif dari pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia (orang dan barang dari Indonesia) yang cenderung mempunyai unsur diskriminasi, hal itu akan berdampak buruk terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya perdagangan luar negeri Indonesia dengan Amerika Serikat, ekspor-impor menjadi terganggu, dimana kita tahu Amerika Serikat adalah lahan terbesar bagi ekspor barang dari Indonesia.

TABEL

**Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat
Terhadap Indonesia**

No	Kebijakan Pra – Tragedi WTC 11 September 2001	No	Kebijakan Pasca Tragedi WTC 11 September 2001
1.	Pada masa Presiden Carter Amerika Serikat menekan Indonesia agar melepaskan tahanan politiknya. Amerika Serikat juga memberikan bantuan militer pada bulan Mei 1978. Amerika Serikat mendukung penuh operasi militer ABRI di Timor-Timur, dan mensuplai kebutuhan persenjataan ABRI.	1.	Amerika Serikat menerapkan kebijakan teror terhadap Indonesia melalui kampanye melawan terorisme. Dalam kampanye tersebut Amerika Serikat melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menangani kasus terorisme yang terjadi di Indonesia.
2.	Pada masa Presiden Bush Amerika Serikat menghentikan program bantuan IMET untuk Indonesia, karena Kongres Amerika Serikat menilai adanya pelanggaran HAM di Timor-Timur yang ditandai dengan adanya tragedi Santa Cruz di Dili 12 Nopember 1991.		Amerika Serikat menekan Pemerintah Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus peledakan Bom Bali, dengan melakukan penangkapan terhadap tokoh Islam Ustadz Abu Bakar Ba'asir dan kawan-kawannya.
3.	Pada masa Presiden Clinton Amerika Serikat mendukung Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB, agar membatalkan transfer pesawat Jet-5 Eks	2.	Amerika Serikat mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuat Perpu dan Undang-undang anti terorisme.

	3. Yordania, akibat dari adanya pelanggaran HAM di Timor-Timur.
4.	Amerika Serikat memasukkan Jakarta dalam daftar perang melawan terorisme, yang kemudian disusul dengan adanya kerjasama latihan bersama anti terorisme bagi tentara Indonesia (IMET).
5.	Amerika Serikat mengancam akan mencabut fasilitas GSP bagi Indonesia karena adanya peristiwa pembunuhan Marsinah (Buruh) di Jawa Timur. Amerika Serikat menganggap Pemerintah Indonesia tidak dapat menjaga hak-hak kaum buruh di Indonesia.
6.	4. Amerika Serikat menerapkan kebijakan Administrasi terhadap warga negara Indonesia dan produk-produk dari Indonesia yang akan masuk ke Amerika Serikat.
7.	15 Juni 1995 Amerika Serikat melalui Komisi Apropriasi House memberikan pendanaan kembali terhadap program bantuan EIMET (pemulihan kembali program IMET)
6.	Amerika Serikat membatalkan rencana penjualan pesawat F-16 terhadap Indonesia, karena adanya kasus penyerbuan Kantor DPP PDI pimpinan Megawati pada 27 Juli 1996.
7.	Amerika Serikat melakukan tekanan terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi dalam wujud IMF.